

RINGKASAN

Nur Shadrina
NIM 220510343

Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Dr. Joelman Subaidi S.H., M.H. dan Dr. Nurarafah S.H., M.H)

Tindak pidana perusakan hutan merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, perekonomian negara, serta kehidupan masyarakat. Perusakan hutan dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun melibatkan beberapa pihak dengan bentuk keterlibatan yang berbeda. Kondisi tersebut memerlukan penegakan hukum yang tepat agar setiap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum khusus yang mengatur perbuatan yang dilarang, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi terhadap pelaku perusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur tindak pidana perusakan hutan, termasuk mengenai subjek hukum, bentuk perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, ketepatan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan pidana, menentukan kualifikasi dan bentuk keterlibatan pelaku, membuktikan unsur tindak pidana, serta menerapkan ketentuan pidana secara tepat. Dengan demikian, persoalan penegakan hukum lebih berkaitan dengan ketepatan dan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum daripada ketidakcukupan norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Disarankan agar aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan bentuk perbuatan serta keterlibatan masing-masing pelaku. Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman dan koordinasi dalam penerapan ketentuan pidana agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perusakan Hutan, Kualifikasi Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana.

SUMMARY

Nur Shadrina
NIM 220510343

Juridical Analysis of Law Enforcement against Perpetrators of Forest Destruction Crimes Based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H)
(Dr. Joelman Subaidi S.H., M.H. dan Dr. Nurarafah S.H., M.H)

Forest destruction is a criminal offense that has broad impacts on environmental sustainability, the national economy, and the welfare of society. Forest destruction may be committed by individuals or involve several parties with different forms of participation. Therefore, effective law enforcement is necessary to ensure that every person who fulfills the elements of a criminal offense can be held criminally responsible in accordance with applicable law. The Government of Indonesia has enacted Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as a specific legal instrument regulating prohibited acts, legal subjects, criminal liability, and sanctions against perpetrators of forest destruction. This research aims to analyze the legal regulation of perpetrators of forest destruction and the law enforcement against such perpetrators based on Law Number 18 of 2013.

This research employs normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to relevant court decisions. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that Law Number 18 of 2013 provides a comprehensive legal framework concerning forest destruction offenses, including legal subjects, prohibited acts, criminal liability, and sanctions applicable to perpetrators. Law enforcement is carried out through investigation, prosecution, and judicial examination based on the applicable legal provisions. In its implementation, effective law enforcement depends on the ability of law enforcement officials to properly identify criminal acts, determine the qualifications and forms of participation of perpetrators, prove the elements of the offense, and appropriately apply the relevant criminal provisions. Therefore, the main issue in law enforcement concerns the accuracy and consistency in applying legal norms by law enforcement officials rather than the inadequacy of the legal norms contained in Law Number 18 of 2013.

It is recommended that law enforcement officials apply Law Number 18 of 2013 carefully, consistently, and in accordance with the nature of the acts and the respective involvement of each perpetrator. Strengthening legal understanding and coordination is also necessary to ensure that law enforcement against forest destruction provides legal certainty, justice, and effectiveness in preventing and eradicating forest destruction.

Keywords: *Juridical Analysis, Forest Destruction, Classification of Offenders, Criminal Liability.*